

Katalog: 3102013.15
ISSN 2715-4157

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI Provinsi Jambi 2024

Volume 13, 2025



Katalog: 3102013.15
ISSN 2715-4157

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI Provinsi Jambi 2024

Volume 13, 2025

<https://jambi.bps.go.id>

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAMBI 2024

Volume 13, 2025

Katalog	:	3102013.15
ISSN	:	2715-4157
Nomor Publikasi	:	15000.25042
Ukuran Buku	:	21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman	:	xii+82 Halaman

Penyusun naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Sumber Ilustrasi:

www.Canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.

TIM PENYUSUN
ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI
PROVINSI JAMBI 2024
Volume 13, 2025

Pengarah:

Agus Sudibyo

Penanggung Jawab:

Sumarmi

Penyunting:

Zulfichar Anggara Adhi Mahendra

Penulis Naskah:

Ridea Anggraini

Pengolah Data:

Ridea Anggraini

Betty Woro Pratiwi

Pembuat Kover:

Fikri Septrian Anggara

Penata Letak:

Ridea Anggraini

KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi 2005-2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025 yang memiliki tujuan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu peningkatan kesejahteraan penduduk merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pemerintahan. Untuk itu diperlukan data yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, sekaligus sebagai dasar evaluasi hasil pembangunan yang telah dan sedang berjalan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan perkapita daerah dalam jangka panjang, dan merupakan salah satu tujuan penting dari kebijakan ekonomi makro untuk mengetahui kemajuan perekonomian. Publikasi “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi 2024” memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi serta turunannya.

Saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan agar publikasi ini pada waktu yang akan datang dapat lebih baik. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Jambi, November 2025

Kepala BPS Provinsi Jambi,



Agus Sudibyo

DAFTAR ISI
ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI
PROVINSI JAMBI 2024
Volume 13, 2025

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup Penulisan	5
BAB II METODOLOGI	9
2.1 Konsep dan Definisi	9
2.2 Penghitungan PDRB menurut Lapangan Usaha	10
2.3 Penghitungan PDRB menurut Penggunaan atau Pengeluaran ...	30
2.3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	30
2.3.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	31
2.3.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	32
2.3.4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	33
2.3.5 Perubahan Stok	35
2.3.6 Ekspor Dan Impor	35
2.4 Mengukur Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah dengan Indeks Williamson	36
2.5 Tipologi Klassen	37
BAB III ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI	41
3.1 Struktur Ekonomi	42
3.2 Pertumbuhan Ekonomi	43
3.3 PDRB Perkapita	45
3.4 PDRB Jambi menurut Pengeluaran	46
3.5 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	50
3.6 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	51
3.7 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	52
3.8 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	53

	Halaman
3.9 Perkembangan Perubahan Inventori	54
3.10 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa	56
3.11. Perkembangan Impor Barang dan Jasa.....	57
 BAB IV ANALISIS PENDAPATAN ANTAR WILAYAH.....	 61
4.1 Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah	61
4.2 Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Tipologi Klassen	64
 DAFTAR PUSTAKA.....	 69
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB	12
Tabel 2.2 Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010	13
Tabel 2.3 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010	14
Tabel 2.4 Klasifikasi Wilayah Menurut Tipologi Klassen	38
Tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi dan Indeks Perkembangan, 2020–2024	41
Tabel 3.2 Struktur Perekonomian Provinsi Jambi (persen), 2020–2024	43
Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (persen), 2020–2024	44
Tabel 3.4 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Jambi, 2020–2024	45
Tabel 3.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (miliar rupiah), 2020–2024	46
Tabel 3.6 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (persen), 2020–2024	48
Tabel 3.7 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (persen), 2020–2024	49
Tabel 3.8 Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jambi, 2020–2024	50
Tabel 3.9 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Provinsi Jambi, 2020–2024	51
Tabel 3.10 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jambi, 2020–2024	53
Tabel 3.11 Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Jambi, 2020–2024 ..	54
Tabel 3.12 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Jambi, 2020–2024	55
Tabel 3.13 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Jambi, 2020–2024	56
Tabel 3.14 Perkembangan Impor Provinsi Jambi, 2020–2024	58
Tabel 4.1 Perkembangan PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi, 2014–2024	61
Tabel 4.2 Indeks Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2014–2024	63

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (miliar rupiah), 2014–2024	47
Gambar 4.1	Plot Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Tipologi Klassen di Provinsi Jambi, 2024	65



1 BAB Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan Interregional Sumatera (Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Bengkulu) karena dapat menjadi pintu gerbang ke luar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari Provinsi lain. Peran Jambi ke depan akan semakin strategis sejalan dengan dimulainya pasar bebas ASEAN (AFTA) China – ASEAN.

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara $00^{\circ} 45'$ sampai $2^{\circ} 45'$ Lintang Selatan dan antara $101^{\circ} 10'$ sampai $104^{\circ} 55'$ Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Luas Wilayah Provinsi Jambi 53.435 km^2 dengan luas daratan $50.160,05\text{ km}^2$ dan luas perairan sebesar $3.274,95\text{ km}^2$.

Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terutama di Provinsi Jambi dengan garis pantai yang panjang (sebagai sumber daya alam) menyimpan sejumlah potensi pengembangan yang dapat dijadikan sebagai kekuatan pembangunan lainnya. Kegiatan perikanan tangkap dan budi daya perairan pantai, pariwisata, pertambangan minyak dan gas serta pengembangan pelabuhan laut pada beberapa lokasi strategis bisa didukung dengan kawasan industri, merupakan potensi lainnya yang dapat dikembangkan di kawasan tersebut. Pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya lokal dan terbarukan antara lain seperti Pengembangan Pusat Agribisnis, terutama untuk pasar-pasar domestik dan pasar regional.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu alat untuk mengetahui struktur ekonomi suatu wilayah, diyakini masih merupakan indikator penting dalam menentukan arah pembangunan. Dengan memperhatikan besarnya peranan masing-masing dalam PDRB, skala prioritas pembangunan dapat ditentukan.

Tingkat pertumbuhan riil PDRB atau yang lebih populer dengan istilah pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan perkapita daerah dalam jangka panjang, dan merupakan salah satu tujuan penting dari kebijakan ekonomi makro untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu wilayah.

PDRB dapat dihitung berdasarkan beberapa pendekatan antara lain pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Penghitungan PDRB dengan ketiga cara di atas secara konsep hasilnya sama. Sampai saat ini BPS Provinsi Jambi telah menghitung PDRB dengan dua pendekatan yakni pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran.

Penyusunan Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2024 ini berisi analisis PDRB dari sisi sektoral, kemudian dilanjutkan dengan analisis PDRB dari sisi pengeluaran. Selanjutnya di bagian akhir terdapat analisis ketimpangan regional antar wilayah di Provinsi Jambi dan pengklasifikasian wilayah berdasarkan Tipologi Klassen.

1.2 Maksud dan Tujuan

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan maksud dan tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Menganalisis struktur ekonomi serta laju pertumbuhan sektoral dilihat dari PDRB menurut lapangan usaha.

2. Menganalisis struktur komponen pengeluaran dan pertumbuhan ekonomi dari sisi PDRB menurut pengeluaran.
3. Melihat seberapa besar ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
4. Melihat klasifikasi pembangunan wilayah berdasarkan Tipologi Klassen.

1.3 Ruang Lingkup Penulisan

Batasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Series Data PDRB yang dipakai dalam penulisan ini adalah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024.
2. Ukuran ketimpangan yang digunakan adalah ketimpangan pendapatan antar wilayah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi dengan menggunakan Indeks Williamson.



2 BAB Metodologi

BAB II

METODOLOGI

2.1 Konsep dan Definisi

Konsep-konsep yang digunakan dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini adalah sebagai berikut :

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar
Angka PDRB atas dasar harga pasar diperoleh dari penjumlahan nilai tambah bruto (NTB), yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan, yaitu: upah dan gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian yang ada di wilayah Provinsi Jambi.
- b. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar
Pada PDRN atas dasar harga pasar ini sudah dikeluarkan nilai penyusutan. Penyusutan adalah susutnya nilai barang modal yang terjadi selama barang-barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi. Penyusutan di sini adalah nilai susut seluruh barang di sektor perekonomian dalam Provinsi Jambi.
- c. PDRN Atas Dasar Biaya Faktor Produksi
Diperoleh dari PDRN atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung neto. Pajak tak langsung neto adalah pajak tak langsung dikurangi subsidi. Pajak tak langsung meliputi pajak penjualan, pajak tontonan, bea ekspor dan impor, cukai dan lain-lain, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseroan.
- d. Pendapatan Regional
Berdasarkan konsep-konsep di atas dapat diketahui bahwa PDRN Atas Dasar Biaya Faktor Produksi sebenarnya merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di Provinsi Jambi. Balas jasa faktor produksi meliputi: upah, bunga, sewa tanah dan laba/keuntungan, atau merupakan pendapatan yang berasal dari wilayah Provinsi Jambi.

Pendapatan Regional Provinsi Jambi adalah PDRN atas dasar biaya faktor produksi ditambah dengan pendapatan dan penerimaan dari luar Provinsi Jambi dikurangi dengan pendapatan/penerimaan yang mengalir ke luar dan masuk diasumsikan saling meniadakan. Sehingga PDRN atas dasar biaya faktor sama dengan Pendapatan Regional.

a. PDRB Perkapita

Merupakan hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

b. Pendapatan Regional Perkapita.

Nilai PDRN atas dasar biaya faktor produksi dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

2.2 Penghitungan PDRB menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatannya yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Manfaat lain yang dapat diperoleh dari data PDRB adalah

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha ekonomi dalam suatu wilayah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan PNRB per satu orang penduduk.
5. PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu negara.

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 melakukan perubahan tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000. Hal ini dilakukan dengan pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam *System National Account (SNA) 2008*.

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 di antaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 antara lain:

1. Konsep dan Cakupan: Perlakuan Work-in Progress (WIP) pada Cultivated Biological Resources (CBR): Merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum dipanen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum dipanen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.
2. Metodologi: Perbaikan metode penghitungan output bank dari Imputed Bank Services Charge (IBSC) menjadi Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM)

3. Valuasi : Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan Harga Dasar (Basic Price). Merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditetapkan produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.
4. Klasifikasi : Klasifikasi yang digunakan berdasarkan *Internasional Standard Classification* (ISIC rev.4) dan *Central Product Classification* (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI 2010).

Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 antara lain dijelaskan pada Tabel 2.1.

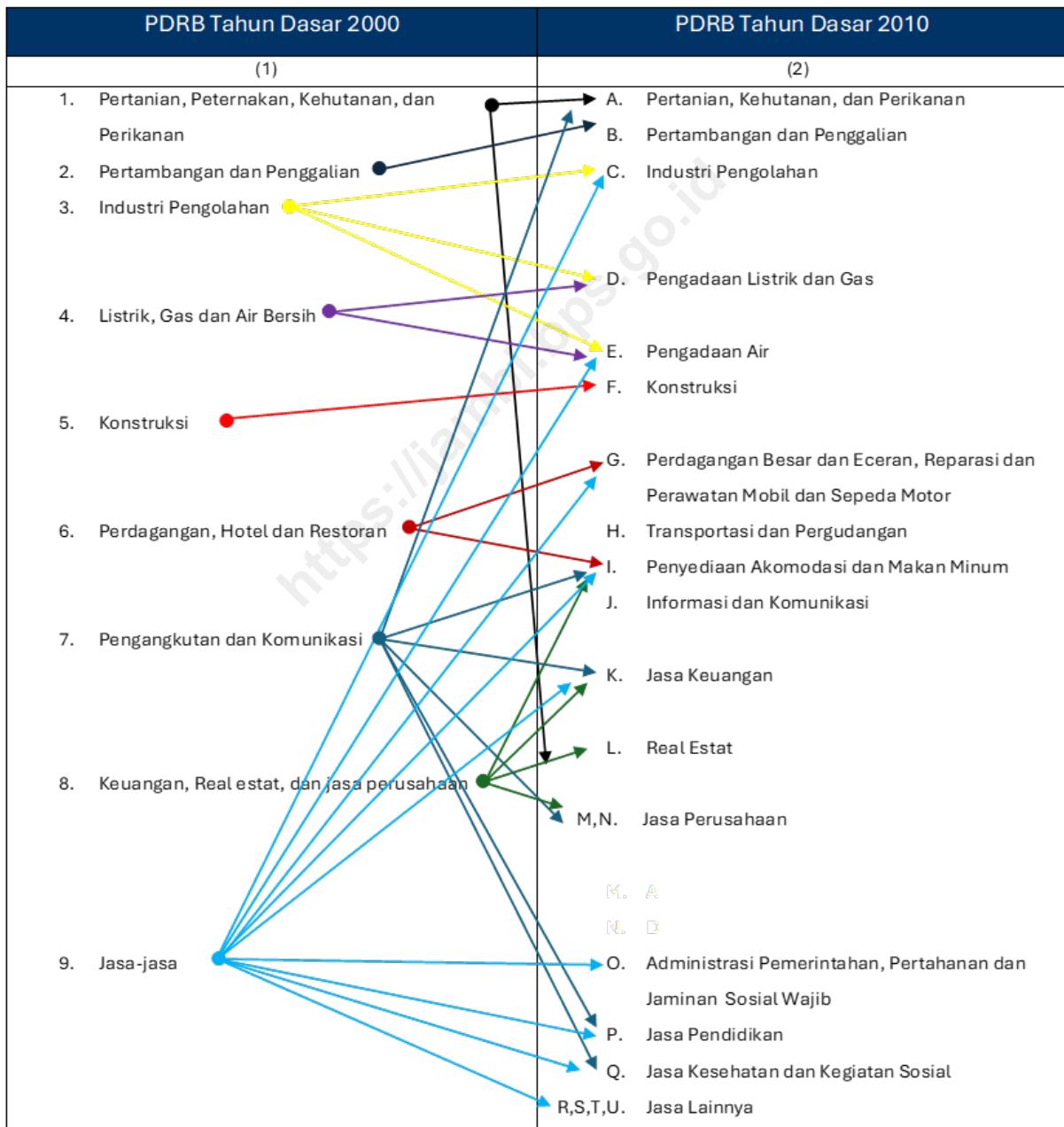
Tabel 2.1
Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB

Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
	(1)	(2)
1. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan
2. Metode penghitungan output bank komersial	Menggunakan metode <i>Imputed Bank Services Charge</i> (IBSC) .	Menggunakan metode <i>Financial Intermediary Services Indirectly Measured</i> (FISIM)
3. Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

Sumber: Badan Pusat Statistik

Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010 Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar
2000 dan 2010



Sumber: System National Accounts 2008

Sementara klasifikasi PDRB menurut pengeluaran tahun dasar 2010 secara garis besar tidak banyak mengalami perubahan seperti tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
(1)	(2)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

Sumber: *System National Accounts 2008*

Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing lapangan usaha dan sublapangan usaha lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Lapangan usaha ini mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dan lain-lain), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dan lain-lain). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman

semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup lapangan usaha pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan di antaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Peternakan

Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Golongan ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dan sebagainya.

Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai

hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkaran satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

Kehutanan dan Penebangan Kayu

Sublapangan usaha ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Perikanan

Sublapangan usaha ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pemberian, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik

Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Perikanan BPS.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Di samping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada lapangan usaha ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat panen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan Cultivated Biological Resources (CBR). Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (standing crops) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (standing crops) di awal periode yang disebut sebagai Work-in-Progress (WIP). Sehingga total output pada lapangan usaha ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP ditambah dengan nilai pelengkapnya.

B Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat sublapangan usaha, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

Sublapangan usaha Pertambangan migas dan panas bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Sublapangan usaha ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

Data produksi untuk pertambangan migas diperoleh dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Data Harga/Indikator Harga juga diperoleh dari Dirjen Migas, ESDM, Statistik PLN, dan Indeks Harga Produsen (IHP) Gas dan Panas Bumi sebagai penggerak harga gas alam dan panas bumi setiap triwulan; Data Struktur Biaya diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Statistik Pertambangan Migas BPS. Data harga minyak mentah menggunakan Indonesia Crude Price (ICP), harga gas bumi pada tahun 2010 yang digerakkan berdasarkan IHP Gas dan Panas bumi. Harga uap panas bumi menggunakan harga panas bumi yang terdapat pada publikasi tahunan Statistik PLN dan digerakkan dengan IHP gas dan panas bumi untuk mendapatkan harga triwulanan.

Pertambangan Batubara dan Lignit

Pertambangan Batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan. Operasi pertambangan

tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemanatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara.

Pertambangan lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan.

Pertambangan Bijih Logam

Sub lapangan usaha ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain. Termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainnya mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya.

Beberapa jenis produknya, antara lain: pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi, pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium (bauksit), tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain-lain; serta pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya.

Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Sublapangan usaha ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasildari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam sublapangan usaha ini adalah komoditi garam hasil penggalian. Output dan produksi

barang-barang galian terdapat pada publikasi Statistik penggalian tahunan. Sementara itu PDRB triwulan di estimasi menggunakan data produksi bahan galian dari Survei Khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi (DNP).

C Industri Pengolahan

Lapangan usaha industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk lapangan usaha industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

D Pengadaan Listrik dan Gas

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Lapangan usaha ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk lapangan usaha ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

F Konstruksi

Lapangan usaha konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal ataupun kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian p prefabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: konstruksi gedung tempat tinggal; konstruksi gedung bukan tempat tinggal; konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; pengeringan: meliputi

pengecoran sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pekerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pekerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pekerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Lapangan usaha ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Lapangan usaha ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengemasan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam. Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-

lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

H Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjalan maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalanan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Lapangan usaha ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

Penyediaan Akomodasi

Sublapangan usaha ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan

makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

Penyediaan Makan dan Minum

Kegiatan sub lapangan usaha ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran self service atau restoran take away, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

J Informasi dan Komunikasi

Lapangan usaha ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Lapangan usaha terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk

penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti cd rom buku referensi, dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film, dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

K Jasa Keuangan dan Asuransi

Lapangan usaha ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Lapangan usaha ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

L Real Estat

Lapangan usaha ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Lapangan usaha ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.

M, N Jasa Perusahaan

Lapangan usaha jasa perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) lapangan usaha, yakni lapangan usaha M dan lapangan usaha N. Lapangan usaha M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan kantingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk lapangan usaha M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya. Lapangan usaha N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk lapangan usaha N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

O. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Lapangan usaha ini juga mencakup perundang -undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di lapangan usaha lain dalam KBLI tidak termasuk pada lapangan usaha ini, meskipun dilakukan oleh badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistem sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada lapangan usaha ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk lapangan usaha pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada lapangan usaha Q.

P. Jasa Pendidikan

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Lapangan usaha ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas

kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

R, S, T, U. Jasa Lainnya

Lapangan usaha jasa Lainnya merupakan gabungan 4 (empat) lapangan usaha pada KBLI 2009. Lapangan usaha ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

Kegiatan Jasa Lainnya

Kegiatan ini berlapangan usaha S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output pertenaga kerja. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi dimana deflatornya adalah IHK Umum.

Data diperoleh dari internal BPS (Sensus Ekonomi, Subdit Statistik Demografi, Susenas, and Subdirektorat Statistik Harga Konsumen).

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

Kegiatan ini berlapangan usaha T mencakup kegiatan yang memanfaatkan jasa perorangan untuk melayani rumah tangga yang didalamnya termasuk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam,tukangkebun,supir,dansejenisnya),dan Kegiatan Yang Menghasilkan Barang

Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya

Lapangan usaha U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The Internasional Moneter Fund, The World Bank, The World Health Organization (WHO), The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), dan lain-lain.

2.3 Penghitungan PDRB menurut Penggunaan atau Pengeluaran

2.3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Perkiraan besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga dihitung berdasarkan data pokok Susenas, data penduduk pertengahan tahun dan indeks harga konsumen. Konsumsi rumah tangga akan meliputi konsumsi seluruh rumah tangga/konsumsi penduduk Jambi ditambah perkiraan konsumsi bukan penduduk tetapi sedang melakukan perjalanan di Jambi dikurangi konsumsi penduduk Jambi yang sedang mengadakan perjalanan di luar wilayah.

Data konsumsi oleh bukan penduduk Jambi sulit diperoleh dari survei konsumsi yang biasa. Sedangkan data yang masih perlu disempurnakan adalah data konsumsi rumah tangga yang sedang berada di luar wilayah, misalnya penduduk Jambi yang mengadakan perjalanan atau menginap di luar Provinsi Jambi, membeli premium dan sebagainya yang secara definisi dianggap sebagai

produk wilayah lain (luar negeri maupun provinsi lain) yang masuk atau merupakan bagian/komponen impor Jambi.

Pada dasarnya konsumsi rumah tangga secara keseluruhan meliputi :

1. Makanan, minuman dan tembakau, baik yang dimasak di rumah ataupun makanan jadi.
2. Perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air.
3. Barang-barang dan jasa.
4. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.
5. Barang-barang tahan lama.
6. Pajak pemakaian dan asuransi jiwa.
7. Pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara.

Data konsumsi rumah tangga hasil SUSENAS biasanya ditanyakan untuk periode satu minggu untuk konsumsi bahan makanan dan satu bulan untuk konsumsi bukan makanan.

2.3.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

Lembaga swasta yang tidak mencari untung adalah lembaga/badan swasta yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, seperti organisasi serikat buruh, persatuan para ahli, organisasi politik, badan-badan keagamaan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat yang khusus melayani masyarakat tanpa adanya motivasi mencari untung.

Dalam penghitungan PDRB menurut penggunaan, yang termasuk dalam lembaga swasta yang tidak mencari untung adalah Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) lembaga, yaitu :

1. Organisasi Kemasyarakatan, seperti: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ICMI, HMI, Kosgoro, MKGR, Kowani, KNPI dan sebagainya.

2. Organisasi Sosial, seperti: Panti Asuhan, Panti Wreda, Panti Rehabilitasi Cacat baik cacat mental maupun fisik.
3. Organisasi Profesi, seperti: IDI, ISEI, Ikatan Statistik Indonesia dan sebagainya.
4. Perkumpulan Sosial/Budaya/Olahraga dan Hobi, seperti: Perkumpulan Rotari Indonesia, Padepokan Seni Budaya, Himpunan Penghayat Kepercayaan, Ikatan Motor Indonesia, Ikatan Penggemar Anggrek Indonesia, RAPI, ORARI dan sebagainya.
5. Lembaga Swadaya Masyarakat, seperti: Lembaga Studi Pembangunan, YLKI, Walhi, YLBHI, Yayasan Dian Desa, Lembaga Pengkajian Strategi Indonesia, dsb.
6. Lembaga Keagamaan, seperti: Pondok Pesantren, Gereja, Masjid, PGI, KWI, Walubi, Parisadha Hindu Dharma Indonesia dan sebagainya.
7. Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa, seperti: Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Jantung Sehat, Yayasan Bimantara, Yayasan Kesejahteraan Gotong Royong, Gerakan Nasional Orangtua Asuh dan sebagainya.

2.3.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Yang dimaksud dengan konsumsi pemerintah adalah semua pengeluaran konsumsi untuk menjalankan kegiatan administrasi pemerintah dan pertahanan, tidak termasuk disini pengeluaran konsumsi oleh perusahaan milik pemerintah karena perusahaan milik pemerintah tersebut telah dimasukkan ke dalam kelompok usaha masing-masing seperti: Perum, Perjan, Persero, PN, PD dan sebagainya.

Pengeluaran konsumsi pemerintah dimaksud adalah pengeluaran yang sifatnya habis dipakai dalam proses produksi setelah dikurangi dengan penjumlahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan

dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi pemerintah), termasuk pengeluaran pertahanan dan keamanan.

Data yang dipergunakan untuk menghitung pengeluaran konsumsi pemerintah adalah bersumber dari laporan Realisasi Pengeluaran Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Sedangkan mengenai Pengeluaran Keuangan Daerah Tingkat I, II dan desa diperoleh dari hasil pengolahan daftar K1, K2 dan K3 masing-masing tahun anggaran.

2.3.4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal dari dalam negeri/wilayah dan barang modal baru atau bekas dari luar negeri/wilayah, yang digunakan untuk berproduksi didalam negeri/wilayah tersebut. Lapangan usaha barang modal yaitu barang yang mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan pemakaian adalah penggunaan barang modal sebagai alat yang tetap dalam berproduksi.

Menurut wujudnya PMTB mencakup 5 (lima) hal:

1. Pembentukan modal tetap berupa bangunan/konstruksi, seperti:
 - Bangunan tempat tinggal
 - Bangunan bukan tempat tinggal
 - Bangunan atau konstruksi lainnya seperti jalan, jembatan, irigasi, pembangkit tenaga listrik dan jaringannya, instalasi telekomunikasi, pemancar tv, pelabuhan terminal, jaringan pipa untuk minyak, gas dan air serta monumen.
 - Perbaikan besar-besaran dari bangunan yang disebutkan di atas.
 - Pembentukan modal berupa bangunan/konstruksi nilai sesuai dengan output bangunan, yaitu nilai seluruh pekerjaan bangunan pada satu tahun tertentu tanpa memperhatikan bangunan tersebut sudah selesai atau belum.

2. Pembentukan modal tetap berupa mesin dan alat perlengkapan, terdiri dari:

- Alat-alat transportasi seperti : kapal laut, kapal terbang, kereta api, bus, truk, dan motor.
- Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian, listrik, pertambangan, pembuatan jalan, jembatan, perlengkapan kantor, toko, hotel, restoran, dll. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan yang masih dalam proses pembuatan tidak termasuk dalam pembentukan modal, melainkan merupakan stok dari produsennya.
- Perluasan perkebunan dan penanaman baru untuk tanaman keras. Tanaman keras yang dimaksud di sini adalah tanaman yang hasilnya baru akan diperoleh setelah berumur satu tahun atau lebih.
- Penambahan ternak yang khusus dipelihara untuk diambil susunya atau bulunya atau untuk dipakai tenaganya dan sebagainya, kecuali ternak yang dipelihara untuk dipotong.
- Margin pedagang atau makelar, jasa pelayanan dan ongkos pemindahan hak milik dalam transaksi jual beli tanah, sumber mineral, hak pengusaha hutan, hak paten, hak cipta dan barang modal bekas tercakup dalam pembentukan modal tetap.

Secara umum barang modal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- Mempunyai umur kegunaan lebih dari satu tahun, sehingga mempunyai nilai penyusutan.
- Pengeluaran untuk barang modal mempunyai manfaat/hasil pada masa yang akan datang dalam jangka waktu yang relatif panjang.
- Nilai per unit dari barang modal relatif besar dibandingkan dengan output sektor yang memakainya.

2.3.5 Perubahan Stok

Stok merupakan persediaan barang, baik berasal dari pembelian, yang akan dipakai sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi atau dijual lagi, maupun barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum dijual, baik dalam bentuk barang jadi maupun barang setengah jadi. Pemegang stok tersebut adalah produsen, pedagang dan pemerintah. Stok pemerintah merupakan barang-barang yang dibeli untuk keperluan strategi, seperti bahan pangan dan bahan bakar yang disediakan guna keperluan waktu kritis. Alat berat seperti kapal dan pesawat merupakan stok bagi pihak produsen. Sementara bangunan yang sedang dikerjakan tidak termasuk stok, melainkan merupakan pembentukan modal tetap bruto.

Apabila semua stok akhir tahun yang ada pada produsen, pedagang dan pemerintah tersebut dikurangi dengan stok awal tahunnya, maka akan diperoleh perubahan stok untuk tahun yang bersangkutan.

2.3.6 Ekspor Dan Impor

Ekspor dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu region dengan penduduk region lain termasuk dengan negara lain, baik melalui udara, laut dan darat. Ekspor dan import tersebut meliputi barang, jasa pengangkutan, jasa asuransi, jasa komunikasi dan berbagai jasa lainnya. Ekspor barang dinilai dengan harga f.o.b (free on board) sedangkan impor jasa dinilai dengan harga c.i.f (cost of insurance, and freight). Ekspor dinilai pada saat barang tersebut diberikan ke bukan penduduk domestik, sedangkan impor dinilai pada saat barang tersebut diterima oleh penduduk. Termasuk dalam kegiatan ekspor adalah pembelian langsung barang dan jasa di wilayah domestik suatu daerah oleh bukan penduduk daerah tersebut.

Data yang tersedia mengenai ekspor dan impor masih sangat terbatas. Data ekspor dan impor antar negara untuk Provinsi Jambi bersumber dari laporan publikasi Ekspor-Import yang diterbitkan BPS, sedangkan untuk antar pulau diperkirakan dari jumlah (ton) arus barang yang dikalikan dengan rata-rata harga per ton barang. Kuantum barang antar pulau melalui laut bersumber dari

Pelabuhan Jambi, Muara Sabak, Kuala Tungkal, dan Nipah Panjang. Untuk transaksi barang lewat darat, penghitungan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan jembatan timbang. Data statistik arus lalu lintas barang yang dicatat pada jembatan timbang merupakan informasi yang cukup penting didalam membantu memperkirakan nilai ekspor dan impor barang melalui darat.

2.4 Mengukur Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah dengan Indeks Williamson

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan ekonomi juga menjadi berbeda. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bilamana pada suatu daerah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Williamson dalam Sjafrizal (2008) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Penelitiannya menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan negara berkembang. Ternyata ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Indeks ketimpangan regional menggambarkan ketimpangan kabupaten/kota di suatu provinsi tertentu.

Indeks Williamson besarnya antara nol dan satu. Semakin kecil angka yang dihasilkan menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil pula atau dapat dikatakan makin merata. Tetapi jika angka yang didapat mendekati satu maka ketimpangan semakin lebar. Para ahli menetapkan sebuah kriteria yang digunakan

untuk menentukan apakah ketimpangan ada pada taraf rendah, sedang atau tinggi. Untuk itu, ditentukan kriteria sebagai berikut:

1. Ketimpangan taraf rendah, bila indeks ketimpangan kurang dari 0,35
2. Ketimpangan taraf sedang, bila indeks ketimpangan 0,35 - 0,5
3. Ketimpangan taraf tinggi, nilai indeks ketimpangan lebih dari 0,5

2.5 Tipologi Klassen

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan klasifikasi tiap kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi. Analisis ini didasarkan pada dua indikator utama yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pendapatan perkapita di suatu daerah. Analisis ini membagi empat klasifikasi daerah yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda- beda yaitu:

1. Kuadran I yaitu daerah maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi.
2. Kuadran II yaitu daerah maju tapi tertekan (*low growth but high income*) merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonominya lebih rendah tapi pendapatan perkapita lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi.
3. Kuadran III yaitu daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tapi pendapatan perkapitanya lebih rendah dibanding rata-rata provinsi.
4. Kuadran IV yaitu daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) merupakan daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan perkapitanya lebih rendah dibanding rata-rata provinsi.

Tabel 2.4
Klasifikasi Wilayah Menurut Tipologi Klassen

Uraian	$Y_{ij} \geq Y_j$	$Y_{ij} < Y_j$
(1)	(2)	(3)
$R_{ij} > R_j$	Kuadran III Daerah berkembang cepat	Kuadran I Daerah maju dan tumbuh cepat
$R_{ij} \leq R_j$	Kuadran IV Daerah relatif tertinggal	Kuadran II Daerah Maju tapi tertekan

Keterangan:

R_{ij} = Laju pertumbuhan PDRB ADHK tiap kabupaten/kota

R_j = Rata-rata laju pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Jambi

Y_{ij} = Pendapatan perkapita tiap kabupaten/kota

Y_j = Rata-rata pendapatan perkapita Provinsi

Sumber: Badan Pusat Statistik



3 BAB

Analisis Pertumbuhan Ekonomi

BAB III

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI

Perkembangan taraf kesejahteraan rakyat dapat ditinjau dari perspektif obyektif dan subyektif. Perspektif obyektif didasarkan pada ukuran atau indikator yang dapat mengidentifikasi status kesejahteraan rakyat tanpa melibatkan persepsi responden. Persepsi subyektif didasarkan pada pandangan atau persepsi masyarakat terhadap perubahan taraf hidup dan kesejahteraan yang mereka rasakan dalam suatu periode tertentu.

PDRB sebagai salah satu indikator ekonomi makro yang disusun berdasarkan perspektif obyektif yang dapat menggambarkan perekonomian Provinsi Jambi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sedang harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

Tabel 3.1
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi dan Indeks Perkembangan,
2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB ADHB (miliar Rp)	205.081,99	232.294,15	276.936,85	293.780,01	322.975,53
Indeks perkembangan (%)	226,31	256,34	305,61	324,19	356,41
Nilai PDRB ADHK (miliar Rp)	148.354,25	153.850,63	161.731,95	169.277,62	176.906,50
Indeks perkembangan (%)	163,71	169,78	178,48	186,80	195,22

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

PDRB Provinsi Jambi atas dasar harga berlaku tahun 2024 sebesar 322,98 triliun rupiah sedangkan berdasarkan harga konstan mencapai 176,91 triliun rupiah. Berdasarkan harga berlaku selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2024 berkembang 3,6 kali lebih besar dibandingkan tahun 2010. Berdasarkan harga konstan PDRB Provinsi Jambi berkembang 2 kali lebih besar dibandingkan tahun 2010.

3.1. Struktur Ekonomi

Pendayagunaan setiap sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB Provinsi Jambi diharapkan dapat dan mampu mengangkat taraf kehidupan masyarakat menuju arah yang lebih baik. Kontribusi masing-masing sektor pembentuk PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan sumbangan sektor-sektor ekonomi pada tahun tersebut. Pada tahun 2024, sektor ekonomi yang mempunyai kontribusi diatas 10 persen dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 10 persen.

Tabel 3.2
Struktur Perekonomian Provinsi Jambi (persen), 2020–2024

Lapangan usaha		Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	30,99	31,53	30,18	31,82	33,93	
B	Pertambangan dan Penggalian	12,28	14,20	19,23	15,31	13,41	
C	Industri Pengolahan	10,73	10,25	9,77	9,99	9,77	
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	
F	Konstruksi	8,00	7,95	7,01	7,37	7,42	
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,62	12,51	12,21	13,30	13,29	
H	Transportasi dan Pergudangan	2,75	2,61	2,86	3,20	3,22	
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,19	1,11	1,05	1,09	1,10	
J	Informasi dan Komunikasi	4,46	4,10	3,67	3,71	3,56	
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,63	2,57	2,32	2,27	2,16	
L	Real Estate	1,74	1,62	1,50	1,49	1,45	
M,N	Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan,	1,26	1,19	1,29	1,49	1,53	
O	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,85	4,30	3,58	3,52	3,68	
P	Jasa Pendidikan	3,88	3,53	3,10	3,08	3,06	
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,37	1,43	1,19	1,21	1,27	
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,02	0,91	0,86	0,95	0,96	
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2024, ekonomi Jambi tumbuh sebesar 4,51 persen. Pertumbuhan paling tinggi dialami oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Lainnya yaitu sebesar 13,26 persen, diikuti oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh 11,31 persen. Semua lapangan usaha usaha membaik kondisinya dibandingkan tahun lalu, walaupun beberapa lapangan usaha tumbuh melambat dibandingkan tahun 2023.

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (persen), 2020–2024

Lapangan usaha	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,51	3,67	5,00	5,61	4,25
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,02	2,12	7,76	0,07	-0,87
C	Industri Pengolahan	0,12	1,38	3,09	4,19	4,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,59	7,08	11,66	12,15	7,65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,98	5,13	3,15	0,21	1,96
F	Konstruksi	0,88	7,94	-0,88	7,98	9,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,54	5,96	5,40	8,84	5,90
H	Transportasi dan Pergudangan	-14,06	5,56	16,96	8,29	8,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,92	4,97	11,09	8,76	9,64
J	Informasi dan Komunikasi	8,48	3,84	7,25	7,50	5,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,97	5,36	-0,72	1,22	2,32
L	Real Estate	-0,02	3,16	4,22	3,30	5,30
M,N	Jasa Perusahaan	-5,39	4,03	15,13	16,84	9,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-6,32	2,20	-0,65	2,97	11,31
P	Jasa Pendidikan	3,67	1,22	2,02	2,54	8,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,46	15,55	-2,31	4,66	13,26
R,S,T,U	Jasa lainnya	-2,21	0,53	7,81	8,54	8,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		-0,51	3,70	5,12	4,67	4,51
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS		-0,29	5,23	6,42	5,78	4,67

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

3.3 PDRB Perkapita

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari variabel-variabel ekonomi dalam suatu daerah diantaranya dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita atas dasar harga berlaku. PDRB perkapita diperoleh dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Pada tahun 2024 PDRB Provinsi Jambi dengan migas mencapai 322,98 triliun rupiah. Nilai PDRB perkapitanya pada tahun yang sama sebesar 86,72 juta rupiah tumbuh 8,61 persen dari tahun 2023.

Jika faktor migas dihilangkan, di tahun 2024, nilai PDRB Provinsi Jambi sebesar 286,44 triliun rupiah dan PDRB perkapita tanpa migas pada tahun 2024 mencapai 76,91 juta rupiah meningkat sebesar 8,81 persen dibandingkan tahun 2023 yang baru mencapai 70,68 juta rupiah.

Tabel 3.4
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Provinsi Jambi, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (miliar Rp)					
- ADHB (dengan migas)	205.081,99	232.294,15	276.936,85	293.780,01	322.975,53
- ADHB (tanpa migas)	179.148,38	201.769,62	237.313,23	260.053,05	286.444,64
- ADHK 2010	148.354,25	153.850,63	161.731,95	169.277,62	176.906,50
PDRB perkapita (ribu Rp)					
- ADHB (dengan migas)	57.957,73	64.770,93	76.224,16	79.849,56	86.721,51
- ADHB (tanpa migas)	50.628,70	56.259,73	65.318,14	70.682,55	76.912,67
- ADHK 2010	41.926,04	42.898,41	44.515,14	46.009,74	47.500,81
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010	0,27	2,32	3,77	7,25	6,71
Jumlah penduduk (000 orang)	3.538	3.586	3.633	3.679	3.724
Pertumbuhan penduduk (%)	-0,80	1,35	1,30	2,59	2,51

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

3.4 PDRB Jambi menurut Pengeluaran

Kondisi perekonomian Jambi dalam kurun waktu 2020–2024 mengalami sedikit perubahan struktur. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti perubahan penggunaan teknologi, perdagangan global baik dr segi permintaan maupun harga, selain itu peristiwa politik yang terjadi di daerah maupun nasional seperti pemilu 2024. Termasuk pandemi COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian Provinsi Jambi ditengah tahun 2020.

Perubahan struktur tersebut dapat dilihat di tabel 3.5 yang digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 3.5
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran
Provinsi Jambi (miliar rupiah), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	96.651,04	102.858,40	114.393,37	123.853,68	133.131,00
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.274,91	1.330,25	1.490,60	1.700,72	1.959,98
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	17.878,52	18.332,42	18.953,03	19.812,99	21.119,17
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	46.354,76	51.559,91	55.711,02	64.002,61	70.058,09
5. Perubahan Inventori	1.553,19	2.759,71	2.152,94	2.420,23	2.169,38
6. Ekspor	135.816,76	154.158,13	188.337,86	186.911,99	214.625,09
7. Impor	94.447,18	98.704,67	104.101,98	104.922,21	120.087,18
Total PDRB	205.081,99	232.294,15	276.936,85	293.780,01	322.975,53

Catatan: * Angka sementara

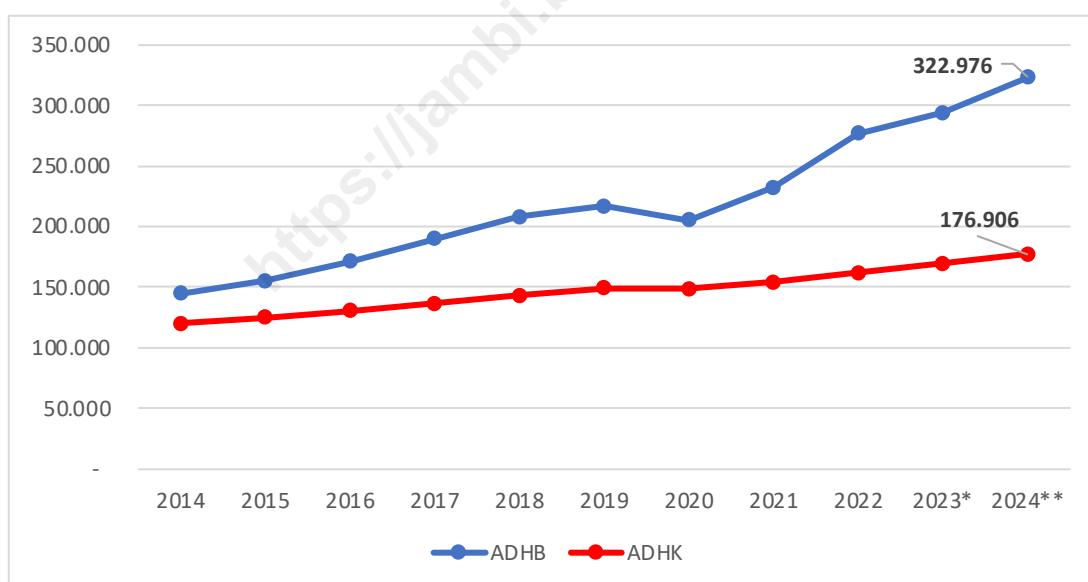
** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tahun 2021, nilai PDRB Jambi atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dibandingkan 2020, pengaruh pandemi COVID-19 yang terjadi di pertengahan tahun 2020 memberi dampak peningkatan yang cukup signifikan. Perubahan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan

harga, perubahan volume serta dampak pandemi yang mempengaruhi roda perekonomian khususnya di komponen ekspor dimana terjadinya larangan ekspor untuk beberapa komoditas. namun di tahun 2022, perkembangan ekspor mulai meningkat menjadi 188,34 triliun di tahun 2022 dan stabil di 186,91 triliun setelah tertahan oleh larangan ekspor. Tahun 2024, ekspor Jambi kembali tumbuh signifikan dengan nilai sebesar 214,63 triliun atau meningkat sebesar 14,83 persen.

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.



Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3.1
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (miliar rupiah), 2014–2024

Pada umumnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku. Dalam PDRB atas dasar harga konstan pengaruh faktor harga telah diatadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan Inventori, ekspor neto atau ekspor (E) dikurangi impor (I).

Tabel 3.6
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (persen), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	47,13	44,28	41,31	42,16	41,22
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,62	0,57	0,54	0,58	0,61
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,72	7,89	6,84	6,74	6,54
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	22,60	22,20	20,12	21,79	21,69
5. Perubahan Inventori	0,76	1,19	0,78	0,82	0,67
6. Ekspor	66,23	66,36	68,01	63,62	66,45
7. Impor	46,05	42,49	37,59	35,71	37,18
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama periode 2020–2024, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 40 persen). Ekspor juga mempunyai peran yang relatif besar, yaitu sekitar 64 sampai dengan 68 persen produk Jambi mampu menembus pasar domestik dan internasional. Pada tahun 2024, porsi impor menunjukkan peningkatan sebesar 37,18 persen dibanding tahun sebelumnya. Selama tahun 2020 hingga

2023, porsi impor sempat mengalami penurunan peran, yaitu dari 46,05 persen menjadi 35,71 persen. Neraca perdagangan Jambi yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor cenderung lebih tinggi dari nilai impor. Kecenderungan neraca perdagangan internasional Jambi dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi “surplus”. Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 20 sampai dengan 22 persen. Sementara itu, proporsi konsumsi akhir pemerintah mengalami penurunan, berada pada rentang 6-8 persen, dengan besaran 8,72 persen pada 2020 hingga menjadi 6,54 persen di tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 secara rata-rata mencapai 3,50 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar -0,51 persen (2020); 3,70 persen (2021), 5,12 persen (2022), 4,67 persen (2023) dan 4,51 persen (2024).

Tabel 3.7
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (persen), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0,44	3,41	4,46	4,19	4,41
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-0,75	1,94	6,05	10,31	12,42
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-5,24	0,05	1,51	1,97	4,54
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,04	9,27	2,51	9,88	6,78
5. Perubahan Inventori					
6. Ekspor	-9,52	4,67	4,22	-1,69	3,54
7. Impor	-14,69	8,53	0,40	-3,79	3,90
Total PDRB	-0,51	3,70	5,12	4,67	4,51

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

3.5 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran Barang dan Jasa yang digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga berasa dari produk domestik dan impor.

Data berikut, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2020–2024 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik secara nominal (atas dasar harga berlaku) maupun riil (atas dasar harga konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2020 sampai dengan 2024 cukup berfluktuatif. Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 47,13 persen dan terendah terjadi pada tahun 2024. Pada tahun 2024, kontribusi Konsumsi Rumah Tangga kembali menurun lebih rendah dibanding 2023, yaitu sebesar 41,22 persen.

Tabel 3.8

Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jambi, 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (miliar Rp)	96.651,04	102.858,40	114.393,37	123.853,68	133.131,00
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	64.991,05	67.206,01	70.205,87	73.149,41	76.374,49
Proporsi terhadap PDRB ADHB (%)	47,13	44,28	41,31	42,16	41,22
Pertumbuhan (%)	-0,44	3,41	4,46	4,19	4,41
Jumlah penduduk (000 orang)	3.538	3.586	3.633	3.679	3.724

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan terkontraksisebesar 0,44 persen pada tahun 2020. Kemudian, pada tahun

berikutnya pertumbuhan berfluktuasi. Secara berturut-turut pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah 3,41 persen (2021), kemudian meningkat di 2022 dengan pertumbuhan 4,46 persen. Pada 2023, pertumbuhan kembali turun menjadi 4,19 persen, dan meningkat kembali di 2024 dengan pertumbuhan 4,41 persen, .

3.6 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, di mana hal tersebut dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB yang minor.

Tabel 3.9
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Provinsi Jambi, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (miliar Rp)	1.274,91	1.330,25	1.490,60	1.700,72	1.959,98
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	838,90	855,19	906,94	1.000,47	1.124,71
Proporsi terhadap PDRB ADHB (%)	0,62	0,57	0,54	0,58	0,61
Pertumbuhan (%)	-0,75	1,94	6,05	10,31	12,42

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara umum dari tahun 2020 sampai dengan 2024, proporsi pengeluaran pada struktur konsumsi Lembaga Non Profit di Jambi cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit pada masing-masing tahun mencapai 0,62 persen (2020); 0,57 persen (2021); 0,54 persen (2022), 0,58 persen (2023) dan 0,61 persen (2024). Kenaikan proporsi pada tahun 2020 disebabkan oleh meningkatnya penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19 sehingga menyebabkan peningkatan peran di

sektor ini. Sementara itu, peningkatan proporsi konsumsi Lembaga Non Profit kembali terjadi pada tahun 2024. Hal ini didorong oleh adanya pesta demokrasi berupa pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

3.7 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian serta perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian berikut ini.

Secara umum, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2020, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku sebesar 17,88 triliun rupiah dikarenakan pandemi COVID-19 dan mulai bergerak naik menjadi 18,33 triliun rupiah di 2021, 18,95 triliun rupiah di 2022, 19,81 triliun rupiah di 2023, hingga meningkat menjadi sebesar 21,12 triliun rupiah di 2024.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga cenderung fluktuatif di kisaran 6 sampai 8 persen, dari 8,72 persen pada tahun 2020 menjadi 6,54 persen pada tahun 2024. Begitu juga dengan perkembangan pengeluaran konsumsi akhir pemerintah juga mengalami fluktuasi dari terkontraksi sebesar 5,24 persen di 2020, kemudian meningkat perlahan di 2021 sebesar 0,05 persen dan terus meningkat sebesar 1,51 persen di 2022, 1,97 persen di 2023, dan 4,54 persen di 2024. Pertumbuhan terkontraksi sebesar 5,24 persen di tahun 2020. Penyebab kontraksi yang dalam tersebut adalah terjadi penghematan dan pemotongan anggaran belanja pemerintah pusat sehingga berimbas terhadap pengeluaran pemerintah di daerah. Sementara itu, tingginya pertumbuhan pengeluaran akhir pemerintah pada 2024 salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya gaji ASN sebesar 8 persen di awal tahun dan penambahan jumlah ASN dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.10
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jambi,
2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (miliar Rp)	17.878,52	18.332,42	18.953,03	19.812,99	21.119,17
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	10.950,82	10.956,42	11.121,82	11.341,35	11.855,71
Proporsi terhadap PDRB ADHB (%)	8,72	7,89	6,84	6,74	6,54
Pertumbuhan (%)	-5,24	0,05	1,51	1,97	4,54

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

3.8 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah). PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data di bawah menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2020–2024 bergerak dinamis dari 1,04 persen (2020) kemudian meningkat tajam di tahun 2021 menjadi 9,27 persen. Hal ini merupakan dampak berakhirnya pandemi di akhir tahun sehingga pelaku usaha bisa bergerak lebih luas setelah lebih setahun pembatasan kegiatan diberlakukan. Kemudian pertumbuhan PMTB kembali befluktuatif, dengan

pertumbuhan sebesar 2,51 persen di 2022, meningkat menjadi 9,88 persen di 2023 kemudian kembali melambat menjadi 6,78 persen di 2024.

Tabel 3.11
Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Jambi, 2020–2024

U r a i a n	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (miliar Rp)	46.354,76	51.559,91	55.711,02	64.002,61	70.058,09
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	32.226,99	35.215,52	36.100,05	39.667,37	42.357,56
Proporsi terhadap PDRB ADHB (%)	22,60	22,20	20,12	21,79	21,69
Pertumbuhan (%)	1,04	9,27	2,51	9,88	6,78

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

3.9 Perkembangan Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 3.12
Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Jambi, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai Perubahan Inventori					
a. ADHB (miliar Rp)	1.553,19	2.759,71	2.152,94	2.420,23	2.169,38
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	814,98	1.720,56	1.286,55	1.271,85	1.069,83
Proporsi terhadap PDRB ADHB (%)	0,76	1,19	0,78	0,82	0,67

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Proporsi komponen ini dalam PDRB nilainya berfluktuasi. Nilai inventori pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,55 triliun rupiah, menjadi 2,76 triliun rupiah pada tahun 2021. Pada tahun 2022, komponen perubahan inventori bernilai sebesar 2,15 triliun rupiah dan di tahun 2023 menjadi sebesar 2,42 triliun rupiah, kemudian kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 2,17 triliun rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pemasaran atau proses industri di 2024 bergerak lebih lancar dibanding tahun sebelumnya.

3.10 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar daerah (luar negeri dan luar provinsi),

baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah, dan sebagainya.

Tabel 3.13
Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Jambi, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai Ekspor					
a. ADHB (miliar Rp)	135.816,76	154.158,13	188.337,86	186.911,99	214.625,09
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	101.607,31	106.352,30	110.836,94	108.965,38	112.821,17
Proporsi terhadap PDRB ADHB (%)	66,23	66,36	68,01	63,62	66,45
Pertumbuhan (%)	-9,52	4,67	4,22	-1,69	3,54

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara total, nilai ekspor barang dan jasa tahun 2023 meningkat sebesar 3,54 persen. Selama 2020–2024, nilai ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan dari 135,82 triliun rupiah (2020); dan terus mengalami peningkatan hingga 214,63 triliun rupiah di 2024.

Pada tahun 2020 komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi sebesar 9,52 persen. Larangan perdagangan ke negara lain selama pandemi COVID-19 terutama negara tujuan utama ekspor Provinsi Jambi (Cina, India, Singapura) membuat nilai ekspor menurun. Namun, secara perlahan-lahan nilai ekspor kembali membaik di tahun 2021 hingga 2024. Secara pertumbuhan, nilai ekspor mengalami kenaikan sebesar 4,67 persen dan 4,22 persen masing-masing di 2021 dan 2022, kemudian terkontraksi sebesar 1,69 persen di tahun 2023 dan kembali mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 3,54 persen.

3.11 Perkembangan Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran konsumsi (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori), dan ekspor, di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Jambi terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Jambi di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Tabel 3.14
Perkembangan Impor Provinsi Jambi, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Impor					
a. ADHB (miliar Rp)	94.447,18	98.704,67	104.101,98	104.922,21	120.087,18
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	63.075,80	68.455,37	68.726,23	66.118,21	68.696,97
Proporsi terhadap PDRB ADHB (%)	46,05	42,49	37,59	35,71	37,18
Pertumbuhan (%)	-14,69	8,53	0,40	-3,79	3,90

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pola perkembangan impor Jambi pada periode tahun 2020 sampai dengan 2024 cenderung fluktuatif (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010). Tahun 2020, impor dari Provinsi Jambi mencapai 94,45 triliun rupiah dan terus meningkat hingga 2024. Pada 2021 nilai impor sebesar menjadi 98,70 triliun rupiah kemudian meningkat menjadi 104,10 triliun rupiah di 2022, 104,92 triliun rupiah di 2023, dan menjadi 120,09 triliun rupiah di tahun 2024.

Proporsi impor barang dan jasa pada tahun 2020 sampai 2023 secara berturut-turut mengalami perlambatan. Dari 46,05 persen (2020), 42,49 persen (2021), 37,59 persen (2022), dan 35,71 persen (2023). Proporsinya kembali meningkat menjadi 37,18 persen pada 2024.

Demikian juga secara riil, nilai impor mengalami naik turun selama kurun waktu 2020 sampai 2024. Pada tahun 2020, nilai impor terkontraksi cukup dalam yaitu sebesar 14,69 persen. Kemudian pada 2021 kembali meningkat sebesar 8,53 persen dan melaju dengan lambat di 2022 sebesar 0,40 persen dan kembali terkontraksi di tahun 2023 sebesar 3,79 persen. Sementara itu, pertumbuhan impor kembali meningkat di tahun 2024 dengan nilai sebesar 3,90 persen.



4 BAB

Analisis Pertumbuhan Dan Pendapatan Antar Wilayah

BAB IV

ANALISIS PENDAPATAN ANTAR WILAYAH

4.1 Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah

Berbicara masalah ketimpangan pendapatan, tidak akan terlepas dari dua komponen pembentuknya yakni PDRB perkapita dan jumlah penduduk. PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah bruto yang diciptakan setiap penduduk melalui aktivitas produksi. Jika PDRB perkapita meningkat, secara hipotesis pendapatan masyarakat juga meningkat, sehingga ukuran ini dapat disajikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Secara nominal, PDRB perkapita Jambi terus meningkat dari tahun 2014 sebesar 43,30 juta rupiah menjadi 86,72 juta rupiah pada tahun 2024.

Tabel 4.1
Perkembangan PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Jambi, 2014–2024

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK (%)	Jumlah Penduduk	PDRB per kapita ADHB (ribu Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	7,36	5,49	3.344.421	43.300,30
2015	4,21	2,44	3.402.052	45.580,04
2016	4,37	2,65	3.458.926	49.494,98
2017	4,60	2,93	3.515.017	53.993,40
2018	4,69	3,07	3.570.272	58.224,89
2019	4,35	4,46	3.566.197	60.828,86
2020	-0,51	0,27	3.538.475	57.957,73
2021	3,70	2,32	3.586.395	64.770,93
2022	5,12	3,77	3.633.190	76.224,16
2023*	4,67	3,36	3.679.169	79.849,56
2024**	4,51	3,24	3.724.284	86.721,51

Catatan: Data Jumlah penduduk 2010-2018: Proyeksi SP 2020; 2019: Supas 2015; 2020-2024: Proyeksi Interim 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik

Peningkatan ini mengisyaratkan terjadi peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat. Peningkatan ini akan memperbaiki daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan perkapita, yaitu menjadi 57,96 juta rupiah. Kondisi ini dikarenakan lesunya aktivitas perekonomian secara global karena pandemi COVID-19. Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi, pada 2021 pendapatan perkapita pun turut terdongkrak sebesar 64,77 juta rupiah; 76,22 juta rupiah di 2022, 79,85 juta rupiah di 2023, dan 86,72 juta rupiah di 2024. Angka PDRB perkapita suatu daerah dipengaruhi oleh jumlah penduduk daerah bersangkutan. Keduanya memiliki hubungan berbanding terbalik. Perkembangan PDRB perkapita, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk pada tahun 2014-2024 terlihat dalam Tabel 4.1.

Besar kecilnya ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan di Provinsi Jambi. Ketimpangan pendapatan dapat diukur dan dijelaskan dengan menggunakan beberapa rumus atau formula. Dalam tulisan ini. digunakan rumus atau formula yang dikemukakan oleh Williamson (1965), yang kemudian dikenal dengan Indeks Williamson (Iw). Nilai Iw yang kecil menggambarkan tingkat ketimpangan yang rendah atau tingkat pemerataan yang lebih baik, dan sebaliknya apabila nilai Iw besar maka menggambarkan tingkat ketimpangan yang tinggi atau tingkat pemerataan yang semakin timpang.

Setelah dilakukan penghitungan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi, dapat dilihat bahwa rata-rata indeks ketimpangan pendapatannya adalah sebesar 0,41; hal ini mengindikasikan bahwa nilai indeks ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi masih dalam kategori sedang. Selain itu dapat dilihat juga bahwa perkembangan ketimpangan setiap tahun secara perlahan mengalami penurunan. Kondisi ini dapat diketahui dari nilai penghitungan Indeks Williamson seperti yang terlihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Indeks Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/kota
di Provinsi Jambi, 2014–2024

Tahun	Indeks Williamson
(1)	(2)
2014	0,49
2015	0,48
2016	0,47
2017	0,46
2018	0,47
2019	0,48
2020	0,47
2021	0,45
2022	0,43
2023	0,41
2024	0,41

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

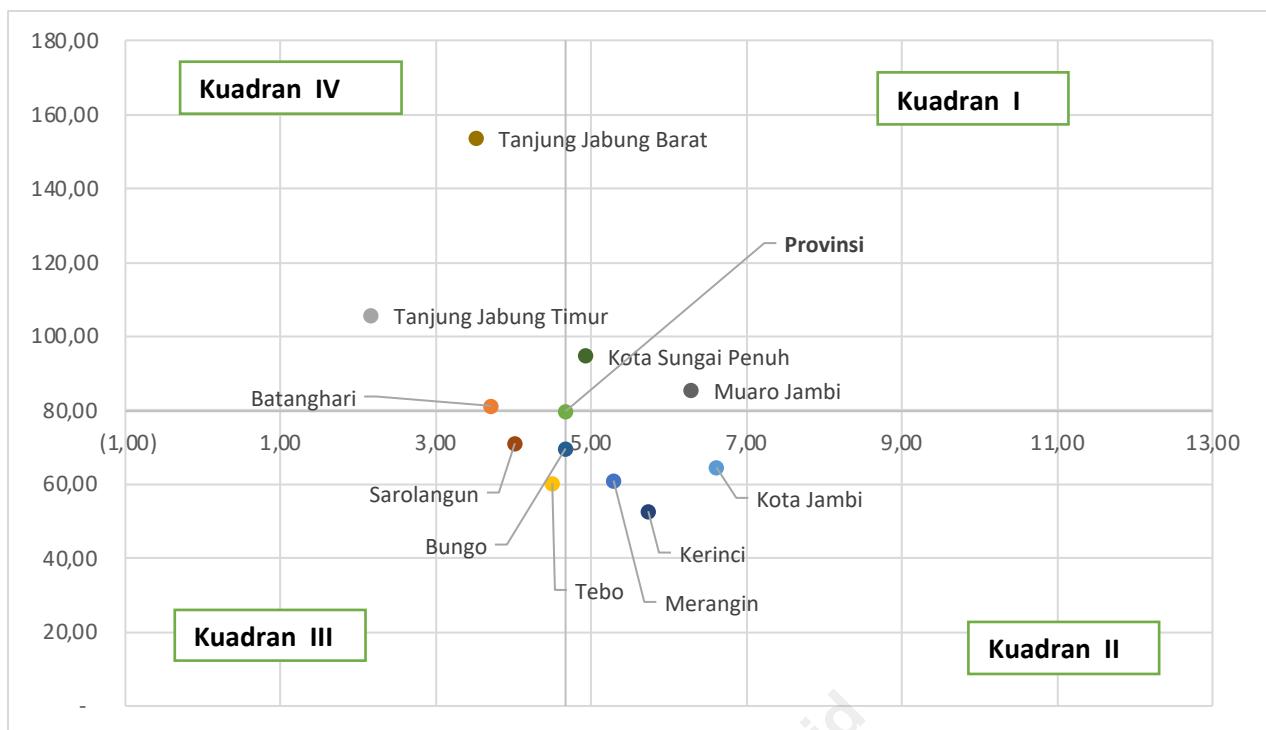
Nilai Indeks Williamson (Iw) terendah terjadi pada tahun 2023 dan 2024 yakni sebesar 0,41 sedangkan nilai Iw tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 0,49. Secara umum, penyebab ketimpangan antar wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi adalah faktor kepemilikan sumber daya alam dan persebaran penduduk. Beberapa kabupaten seperti Tanjab Barat, Tanjab Timur, Batanghari, Muaro Jambi, Sarolangun, Tebo, dan Kota Jambi memiliki sumber migas sementara kabupaten lainnya tidak memiliki migas. Seperti diketahui, komoditas migas merupakan komoditas yang sulit diprediksi baik dari sisi produksi maupun sisi harga. Dimana harga migas ditentukan oleh harga pasar global.

4.2 Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Tipologi Klassen

Selain melihat angka ketimpangan dengan Indeks Williamson, ketimpangan yang terjadi dapat dilihat juga dengan analisis Klassen Typology. Melalui analisis Klassen Typology, dapat dilihat bagaimana pengklasifikasian setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Dalam penelitian ini, analisis Klassen Typology digunakan untuk membagi daerah berdasarkan dua indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB perkapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata PDRB perkapita, daerah yang diamati dibagi dalam empat klasifikasi, yaitu: (1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*); (2) daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*); (3) daerah berkembang cepat (*high growth but low income*); dan (4) daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*).

Berdasarkan hasil pengelompokan dengan Klassen Typology seperti terlihat pada grafik 4.1 yang menggunakan rata-rata pertumbuhan PDRB dan PDRB perkapita tahun 2024, Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur dan Kota Sungai Penuh termasuk dalam klasifikasi daerah yang maju dan cepat tumbuh berada di kuadran I. Pada klasifikasi Daerah berkembang cepat di kuadran II yaitu Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Merangin. Merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonominya lebih tinggi tapi pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata provinsi. Untuk klasifikasi daerah maju tapi tertekan dimana laju pertumbuhan dibawah provinsi namun PDRB perkapitanya berada diatas rata-rata Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berada di kuadran IV. Pada daerah tertinggal yaitu Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo yang memiliki baik PDRB perkapita dan Laju pertumbuhan ekonominya berada di bawah provinsi berada di kuadran III.

Dari gambar 4.1 terlihat bahwa plot kabupaten/kota cenderung berkumpul mendekati garis rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa klasifikasi pembangunan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi relatif merata.



Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Gambar 4.1
Plot Pengelompokan Kabupaten/kota Berdasarkan Tipologi Klassen di Provinsi Jambi, 2024

Pengklasifikasian berdasarkan Klassen Typology ini bersifat dinamis karena sangat tergantung pada perkembangan kegiatan pembangunan pada provinsi yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa dalam periode waktu penelitian yang berbeda, pengklasifikasian akan dapat berubah sesuai dengan perkembangan laju pertumbuhan dan tingkat PDRB perkapita di masing-masing daerah pada saat itu.



https://jambi.sch.id

Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2025. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha 2020-2024*. Jakarta: BPS.
- Sjafrijal. 2018. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- United Nations Statistics Division. 2009. *System of National Accounts 2008*. New York: United Nations.



Lampiran

Lampiran 1 PDRB Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2020–2024

Kategori		Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	63.563,09	73.232,41	83.575,82	93.493,24	109.582,14	
B	Pertambangan dan Penggalian	25.187,29	32.981,27	53.248,55	44.971,82	43.306,64	
C	Industri Pengolahan	22.005,03	23.805,80	27.044,00	29.358,72	31.557,12	
D	Pengadaan Listrik & Gas	153,10	165,62	191,07	220,70	243,34	
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	311,52	331,08	351,76	381,64	401,06	
F	Konstruksi	16.416,36	18.470,77	19.406,84	21.652,24	23.950,37	
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25.877,93	29.050,26	33.815,59	39.071,90	42.913,88	
H	Transportasi dan Pergudangan	5.643,61	6.059,99	7.913,42	9.412,83	10.402,40	
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.434,25	2.568,64	2.901,79	3.189,68	3.552,76	
J	Informasi dan Komunikasi	9.136,89	9.512,95	10.176,68	10.913,12	11.503,13	
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.395,09	5.976,35	6.425,22	6.669,96	6.964,76	
L	Real Estate	3.567,87	3.753,55	4.151,36	4.367,76	4.672,80	
M.N	Jasa Perusahaan	2.582,95	2.765,47	3.558,99	4.365,85	4.944,18	
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.949,18	9.999,47	9.922,26	10.335,52	11.895,16	
P	Jasa Pendidikan	7.965,99	8.200,96	8.585,01	9.036,78	9.892,99	
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.806,00	3.315,43	3.287,65	3.553,51	4.103,42	
R.S.T.U	Jasa lainnya	2.085,84	2.104,12	2.380,83	2.784,73	3.089,36	
Produk Domestik Regional Bruto		205.081,99	232.294,15	276.936,85	293.780,01	322.975,53	
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Non Migas		179.148,38	201.769,62	237.313,23	260.053,05	286.444,64	

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 2 PDRB Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2020–2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39.751,94	41.209,13	43.268,38	45.697,30	47.640,38
B	Pertambangan dan Penggalian	34.988,96	35.730,22	38.502,03	38.528,96	38.192,88
C	Industri Pengolahan	15.513,67	15.727,35	16.213,29	16.892,88	17.691,80
D	Pengadaan Listrik & Gas	81,14	86,89	97,02	108,81	117,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	202,68	213,08	219,78	220,25	224,57
F	Konstruksi	11.140,58	12.025,01	11.919,01	12.870,48	14.135,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.203,50	15.049,58	15.862,79	17.264,36	18.282,69
H	Transportasi dan Pergudangan	4.203,82	4.437,48	5.190,27	5.620,46	6.080,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.582,75	1.661,43	1.845,60	2.007,34	2.200,93
J	Informasi dan Komunikasi	6.101,01	6.335,00	6.794,21	7.303,95	7.686,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.487,26	3.674,27	3.647,83	3.692,37	3.778,18
L	Real Estate	2.212,00	2.281,92	2.378,19	2.456,56	2.586,73
M.N	Jasa Perusahaan	1.480,60	1.540,30	1.773,38	2.071,95	2.269,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.823,16	4.929,30	4.897,51	5.043,18	5.613,63
P	Jasa Pendidikan	5.153,71	5.216,53	5.321,83	5.457,12	5.918,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.914,10	2.211,80	2.160,69	2.261,37	2.561,12
R.S.T.U	Jasa lainnya	1.513,38	1.521,33	1.640,14	1.780,29	1.926,19
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		148.354,25	153.850,63	161.731,95	169.277,62	176.906,50
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Non Migas		116.498,94	122.592,99	130.465,99	138.005,43	144.453,09

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 3 Distribusi PDRB Provinsi Jambi Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (persen), 2020–2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,99	31,53	30,18	31,82	33,93
B	Pertambangan dan Penggalian	12,28	14,20	19,23	15,31	13,41
C	Industri Pengolahan	10,73	10,25	9,77	9,99	9,77
D	Pengadaan Listrik & Gas	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12
F	Konstruksi	8,00	7,95	7,01	7,37	7,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,62	12,51	12,21	13,30	13,29
H	Transportasi dan Pergudangan	2,75	2,61	2,86	3,20	3,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,19	1,11	1,05	1,09	1,10
J	Informasi dan Komunikasi	4,46	4,10	3,67	3,71	3,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,63	2,57	2,32	2,27	2,16
L	Real Estate	1,74	1,62	1,50	1,49	1,45
M.N	Jasa Perusahaan	1,26	1,19	1,29	1,49	1,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,85	4,30	3,58	3,52	3,68
P	Jasa Pendidikan	3,88	3,53	3,10	3,08	3,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,37	1,43	1,19	1,21	1,27
R.S.T.U	Jasa lainnya	1,02	0,91	0,86	0,95	0,96
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Non Migas		87,35	86,86	85,69	88,52	88,69

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 4 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha (persen), 2020–2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,51	3,67	5,00	5,61	4,25
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,02	2,12	7,76	0,07	-0,87
C	Industri Pengolahan	0,12	1,38	3,09	4,19	4,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,59	7,08	11,66	12,15	7,65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,98	5,13	3,15	0,21	1,96
F	Konstruksi	0,88	7,94	-0,88	7,98	9,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,54	5,96	5,40	8,84	5,90
H	Transportasi dan Pergudangan	-14,06	5,56	16,96	8,29	8,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,92	4,97	11,09	8,76	9,64
J	Informasi dan Komunikasi	8,48	3,84	7,25	7,50	5,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,97	5,36	-0,72	1,22	2,32
L	Real Estate	-0,02	3,16	4,22	3,30	5,30
M.N	Jasa Perusahaan	-5,39	4,03	15,13	16,84	9,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-6,32	2,20	-0,65	2,97	11,31
P	Jasa Pendidikan	3,67	1,22	2,02	2,54	8,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,46	15,55	-2,31	4,66	13,26
R.S.T.U	Jasa lainnya	-2,21	0,53	7,81	8,54	8,20
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		-0,51	3,70	5,12	4,67	4,51
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Non Migas		-0,29	5,23	6,42	5,78	4,67

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 5 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2020–2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	10.460.271,15	11.237.959,76	12.225.789,62	13.405.565,21	14.719.249,55
Merangin	15.670.880,89	17.837.345,92	20.284.589,15	22.525.571,84	25.472.374,42
Sarolangun	14.429.424,24	16.558.991,87	20.820.779,85	21.506.607,03	22.701.229,15
Batanghari	16.392.804,31	18.809.259,29	24.307.960,11	25.447.075,55	26.149.802,94
Muaro Jambi	24.382.388,38	27.558.337,82	32.959.038,66	35.891.071,31	40.475.990,33
Tanjung Jabung Timur	19.563.266,92	21.783.660,67	25.606.546,92	25.073.107,07	27.296.263,56
Tanjung Jabung Barat	37.133.854,04	42.080.582,43	50.082.765,39	50.845.889,10	55.732.849,97
Tebo	14.737.984,32	16.949.287,67	19.698.960,62	21.165.335,38	23.908.922,31
Bungo	17.305.753,26	20.082.887,79	24.909.942,61	26.274.124,65	27.356.372,61
Kota Jambi	29.465.149,83	31.918.626,40	36.188.044,32	40.150.778,93	43.375.475,83
Kota Sungai Penuh	7.562.248,32	7.980.858,72	8.680.472,33	9.477.380,83	10.280.794,59

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 6 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah), 2020–2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	6.567.278,35	6.822.790,51	7.125.012,39	7.533.322,15	7.877.282,55
Merangin	9.863.651,50	10.380.348,12	10.973.628,37	11.552.988,95	12.078.181,23
Sarolangun	10.690.592,98	11.396.946,09	12.163.617,58	12.651.331,03	13.119.544,47
Batanghari	11.662.606,61	12.227.810,39	13.727.430,12	14.237.065,83	14.663.019,04
Muaro Jambi	16.183.856,72	16.825.148,42	18.178.829,61	19.319.969,70	20.511.237,52
Tanjung Jabung Timur	17.349.982,79	17.373.513,48	17.471.863,87	17.850.087,72	18.695.008,58
Tanjung Jabung Barat	30.654.416,24	31.072.193,90	31.871.335,53	32.987.604,55	34.456.447,81
Tebo	10.158.234,55	10.593.958,00	11.260.525,69	11.766.754,52	12.234.472,54
Bungo	12.490.069,18	13.113.569,73	13.733.318,57	14.377.222,80	14.851.303,01
Kota Jambi	18.721.127,01	19.494.089,20	20.540.751,95	21.810.341,55	22.896.424,32
Kota Sungai Penuh	4.600.226,14	4.768.840,34	4.980.125,76	5.224.212,04	5.490.462,45

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 7 PDRB Provinsi Jambi Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	96.651,04	102.858,40	114.393,37	123.853,68	133.131,00
1.a. Makanan, minuman, dan rokok	43.901,66	46.950,02	52.986,60	57.365,11	62.523,27
1.b. Pakaian dan alas kaki	3.049,39	3.098,61	3.409,29	3.550,33	3.803,83
Perumahan, perkakas,					
1.c. perlengkapan & penyelenggaraan rumah tangga	15.300,98	15.901,23	17.406,16	18.561,11	19.502,65
1.d. Kesehatan dan pendidikan	12.828,94	13.344,12	13.756,22	14.539,70	15.383,90
1.e. Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya	19.240,69	21.078,14	23.922,27	26.643,38	28.427,40
1.f. Hotel dan restoran	804.415019	858,12	990,93	1.086,72	1.199,18
1.g. Lainnya	1.524,96	1.628,17	1.921,89	2.107,33	2.290,76
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.274,91	1.330,25	1.490,60	1.700,72	1.959,98
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	17.878,52	18.332,42	18.953,03	19.812,99	21.119,17
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	46.354,76	51.559,91	55.711,02	64.002,61	70.058,09
4.a. Bangunan	33.658,19	38.203,76	40.371,18	45.167,58	49.922,76
4.b. Non-bangunan	12.696,56	13.356,15	15.339,85	18.835,03	20.135,33
5. Perubahan Inventori	1.553,19	2.759,71	2.152,94	2.420,23	2.169,38
6. Ekspor	135.816,76	154.158,13	188.337,86	186.911,99	214.625,09
7. Impor	94.447,18	98.704,67	104.101,98	104.922,21	120.087,18
Produk Domestik Regional Bruto	205.081,99	232.294,15	276.936,85	293.780,01	322.975,53

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 8 PDRB Provinsi Jambi Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	64.991,05	67.206,01	70.205,87	73.149,41	76.374,49
1.a. Makanan, minuman, dan rokok	27.923,20	28.478,06	29.602,47	30.559,48	31.769,09
1.b. Pakaian dan alas kaki	2.321,06	2.345,99	2.560,59	2.652,67	2.747,82
Perumahan, perkakas,					
1.c. perlengkapan & penyelenggaraan rumah tangga	9.930,97	10.210,44	10.714,43	11.178,79	11.696,71
1.d. Kesehatan dan pendidikan	8.993,40	9.268,59	9.497,29	9.933,67	10.381,52
1.e. Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya	14.260,42	15.292,48	16.079,02	16.958,89	17.812,94
1.f. Hotel dan restoran	503,94	530,13	584,19	629,56	679,01
1.g. Lainnya	1.058,06	1.080,31	1.167,88	1.236,35	1.287,40
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	838,90	855,19	906,94	1.000,47	1.124,71
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10.950,82	10.956,42	11.121,82	11.341,35	11.855,71
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	32.226,99	35.215,52	36.100,05	39.667,37	42.357,56
4.a. Bangunan	23.379,78	25.593,27	25.401,06	27.510,27	30.182,39
4.b. Non-Bangunan	8.847,21	9.622,25	10.698,99	12.157,11	12.175,17
5. Perubahan Inventori	814,98	1.720,56	1.286,55	1.271,85	1.069,83
6. Ekspor	101.607,31	106.352,30	110.836,94	108.965,38	112.821,17
7. Impor	63.075,80	68.455,37	68.726,23	66.118,21	68.696,97
Produk Domestik Regional Bruto	148.354,25	153.850,63	161.731,95	169.277,62	176.906,50

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 9 Distribusi PDRB Provinsi Jambi Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (persen), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	47,13	44,28	41,31	42,16	41,22
1.a. Makanan, minuman, dan rokok	21,41	20,21	19,13	19,53	19,36
1.b. Pakaian dan alas kaki	1,49	1,33	1,23	1,21	1,18
1.c. Perumahan, perkakas, perlengkapan & penyelenggaraan rumah tangga	7,46	6,85	6,29	6,32	6,04
1.d. Kesehatan dan pendidikan	6,26	5,74	4,97	4,95	4,76
1.e. Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya	9,38	9,07	8,64	9,07	8,80
1.f. Hotel dan restoran	0,39	0,37	0,36	0,37	0,37
1.g. Lainnya	0,74	0,70	0,69	0,72	0,71
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,62	0,57	0,54	0,58	0,61
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,72	7,89	6,84	6,74	6,54
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	22,60	22,20	20,12	21,79	21,69
4.a. Bangunan	16,41	16,45	14,58	15,37	15,46
4.b. Non-Bangunan	6,19	5,75	5,54	6,41	6,23
5. Perubahan Inventori	0,76	1,19	0,78	0,82	0,67
6. Ekspor	66,23	66,36	68,01	63,62	66,45
7. Impor	46,05	42,49	37,59	35,71	37,18
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 10 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran (persen), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0,44	3,41	4,46	4,19	4,41
1.a. Makanan,minuman,dan rokok	0,93	1,99	3,95	3,23	3,96
1.b. Pakaian dan alas kaki	-4,12	1,07	9,15	3,60	3,59
1.c. Perumahan, perkakas, perlengkapan & penyelenggaraan rumah tangga	1,16	2,81	4,94	4,33	4,63
1.d. Kesehatan dan pendidikan	5,29	3,06	2,47	4,59	4,51
1.e. Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya	-6,30	7,24	5,14	5,47	5,04
1.f. Hotel dan restoran	-6,00	5,20	10,20	7,77	7,85
1.g. Lainnya	-1,96	2,10	8,11	5,86	4,13
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-0,75	1,94	6,05	10,31	12,42
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-5,24	0,05	1,51	1,97	4,54
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,04	9,27	2,51	9,88	6,78
4.a. Bangunan	0,70	9,47	-0,75	8,30	9,71
4.b. Non-Bangunan	1,96	8,76	11,19	13,63	0,15
5. Perubahan Inventori	–	–	–	–	–
6. Ekspor	-9,52	4,67	4,22	-1,69	3,54
7. Impor	-14,69	8,53	0,40	-3,79	3,90
Produk Domestik Regional Bruto	-0,51	3,70	5,12	4,67	4,51

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://jambi.bps.go.id



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI**

Jl. A. Yani No. 4 Telanaipura, Jambi 36122 Telp. 0741-60497
Homepage: <https://www.jambi.bps.go.id>
Email: bps1500@bps.go.id

